

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
 NOMOR : 32 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 26 JUNI 2015  
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA CIREBON

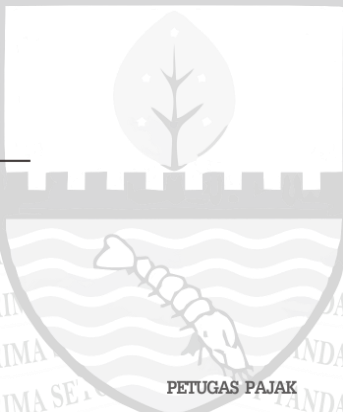
### **1. SPPT PBB**

PEMERINTAH KOTA CIREBON DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		E- SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK	
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN</b>			
NOP :			
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
		NPWP :	
OBJEK PAJAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	KELAS	TOTAL NJOP (Rp.)
<b>NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB =</b> NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP Untuk Penghitungan PBB = PBB Yang Terhutang =			
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)			
TANGGAL JATUH TEMPO :		<b>KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CIREBON</b>	
TEMPAT PEMBAYARAN :			
NAMA WP :		Diterima Tgl. :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan		Tanda Tangan :	
: Kelurahan		(.....)	
NOP :		Nama Terang	
SPPT Tahun/Rp. :			

## **2. SPPT BAGIAN BELAKANG**

<b>Nama Petugas :</b>	<b>Tanda Tangan Petugas :</b>
<b>Diserahkan ke Wajib Pajak Tanggal :</b>	
<p><b>PERHATIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Cirebon.</li> <li>2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.</li> <li>3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.</li> <li>4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung.</li> <li>b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran secara elektronik.</li> </ol> </li> <li>5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui bank/kantor pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.</li> <li>6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan</li> <li>b) Ditagih dengan STP-PBB, dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan Penyitaan dan Pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.</li> </ol> </li> <li>7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.</li> <li>8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Diterimanya SPPT ini;</li> <li>b) Terjadinya Bencana Alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.</li> </ol> </li> <li>9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.</li> <li>10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.</li> <li>11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait.</li> <li>12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2000 dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999.</li> <li>13. Apabila Tanggal Jatuh Tempo tertulis Tanggal :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 November s/d tanggal 30 November; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.</li> <li>b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November; bulan II adalah tanggal 11 November s/d 10 Desember, dst.</li> </ol> </li> </ol>	
<p><b>MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB</b></p>	

### 3. SURAT TANDA SETORAN (STTS)

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) BANK BJB	
BUKTI PEMBAYARAN LUNAS BANK BJB	
PAJAK PBB-P2	
F000 CABANG :	0000
TANGGAL TRANSAKSI	_____ (DD/MM/YYYY)
NOMOR TRANSAKSI	: 110A110A000200004411
KOTA/KABUPATEN	: 0002 PEMKOT CIREBON
TAHUN PAJAK	: 2015
KODE AKUN PJK DAERAH	: 11111
KODE AKUN PDT DENDA	: 0000001
JENIS PP	: PK PERKOTAAN
NAMA WAJIB PAJAK	_____
LOKASI	_____
KELURAHAN	_____
KECAMATAN	_____
PROPINSI	_____
LUAS TANAH	_____
TANGGAL JATUH TEMPO	: 30/09/2015
URAIAN PEMBAYARAN	_____
POKOK PAJAK PBB-P2	: Rp. _____
DENDA	: Rp. _____
JML SETORAN PAJAK TERBILANG	: Rp. _____
 <p>PETUGAS PAJAK</p>	
<p>GEMAN BIRAH LONJUNAWI</p>	
<p>SELURUH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT DAN BANTEN MENYATAKAN RESI INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH YANG SAH PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAPAT DILAKUKAN DI SELURUH JARINGAN KANTOR BANK BJB TERDEKAT</p>	

**4. BENTUK FORMULIR MUTASI SEBAGIAN/SELURUHNYA**  
**OBJEK DAN SUBJEK PBB**

Cirebon,.....

Hal :Mutasi PBB Th. ....

Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
 PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAN ASET DAERAH KOTA  
 CIREBON

Di  
 CIREBON

Dengan hormat,  
 Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 Alamat : .....

Dengan ini Saya mengajukan permohonan mutasi SPPT PBB untuk tahun...

Dari :  
 Nama :  
 Alamat :  
 NOP :  
 Luas Tanah :  
 Luas Bangunan :

Di mutasikan atas nama :

1. ....Luas tanah .....M2. Bangunan .....M2
2. ....Luas tanah .....M2. Bangunan .....M2
3. ....Luas tanah .....M2. Bangunan .....M2

Adapun sisanya .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya lampirkan sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy SPPT dan STTS tahun .....
3. Foto Copy Akta Jual Beli / Hibah / Waris
4. Foto Copy Sertipikat
5. Foto Copy IMB
6. Foto Copy SSB; dan
7. Surat Keterangan Kelurahan dan Kecamatan (Data Baru)

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya saya ucapkan  
 terimakasih.

PEMOHON,

.....

**5.Salinan PBB**

Cirebon,.....

Hal : Permohonan Salinan  
SPPT/STTS PBB  
Tahun .....

Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA  
CIREBON

Di  
CIREBON

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT/STTS

Alasan permohonan penerbitan SPPT/STTS :

- 1. ....;
- 2. ....;
- 3. ....;

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....

**6. PERMOHONAN PENERBITAN SPPT PBB**

Cirebon .....

Hal : Permohonan SPPT PBB  
Tahun Pajak .....Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA  
CIREBONDi  
CIREBON

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Umur : .....Tahun

Pekerjaan : .....

Alamat : Jl/Kp.....Rt .....Rw .....

Kel./Desa : .....

Kecamatan : .....

Kota/Kab : .....

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Betul mempunyai bidang tanah sawah/darat, luas: .....M<sup>2</sup>  
Yang terletak di blok :.....Jl/Kamp : .....  
Kel/Desa : ..... Kec : .....  
Kota/Kab : .....
2. Sampai saat ini belum pernah menerima SPPT PBB
3. Tanah tersebut sampai saat ini masih saya kuasai/miliki dan tidak dalam keadaan sengketa dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : .....
  - Sebelah Timur : .....
  - Sebelah Selatan : .....
  - Sebelah Barat : .....

Maka dengan ini, mohon diterbitkan SPPT PBB untuk tahun ....., dan saya lampirkan persyaratannya antara lain :

- a. Foto Copy KTP ;
- b. Foto Copy Akta/Sertipikat ;
- c. Foto Copy IMB; dan
- d. Surat Keterangan Kelurahan dan Kecamatan.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atas permohonan SPPT PBB ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Pemohon,

(.....)

**7. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB DAN  
PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN SPPT, SKPD PBB DAN STPD PBB  
YANG TIDAK BENAR**

Cirebon .....

Hal : Permohonan Pengurangan/  
Penghapusan Sanksi Administrasi/  
Pembetulan/Pembatalan SPPT/  
SKPD/STPD PBB \*)  
Tahun Pajak .....

Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA  
CIREBON

Di  
CIREBON

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....

Sebagai Wajib Pajak PBB atas objek yang terletak di :

Jalan ..... RT ..... /RW .....  
Kelurahan ..... Kecamatan .....  
Kota .....  
Nomor Induk : .....  
Nomor Seri : .....  
PBB terhutang untuk tahun.... sebesar Rp (.....)  
Tanggal diterima SPPT : .....

Dengan ini mohon Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi/  
Pembetulan/Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB terhutang tersebut diatas  
sebesar.....%(.....persen)

Alasan untuk mengajukan permohonan ini adalah :

1. ....
2. ....
3. ....

Bersama ini dilampirkan pula :

1. Daftar Penghasilan/SK Pensiun/Surat Pernyataan mengenai Penghasilan/  
SPPT Pph \*)
2. Surat Keterangan Kelurahan Tidak Mampu/SKTM.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Pemohon,

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu

**8. PERMOHONAN PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF**

Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Permohonan Pengurangan  
PBB Secara kolektif

Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA  
CIREBON

Di  
CIREBON

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Pengurus LVRI/Lurah \*): .....  
Kecamatan : .....  
Kota : .....  
Nomor Telepon : .....  
Mengajukan permohonan pengurangan PBB yang terutang, atas sejumlah....  
.....

SPPT dengan rincian sebagaimana terdaftar permohonan pengurangan  
PBB secara kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

- Foto copy SPPT Tahun Pajak ..... Sejumlah .....
- Dokumen Pendukung :
  - a. .... Sejumlah .....
  - b. .... Sejumlah .....
  - c. .... Sejumlah .....
  - d. .... Sejumlah .....
  - e. .... Sejumlah .....

Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan.

Cirebon, ..... 20.....  
Pengurus LVRI/Kepala Kelurahan \*)

(.....)

**9. DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF**

Surat Permohonan Pengurangan  
Secara Kolektif

Nomor :

.....

**DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF**

Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kota : .....

Nomor Telepon : .....

No	Wajib Pajak			Objek Pajak		PBB Terhutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan (%)
	Nama	Alamat	NPWP	NOP	Alamat		
1	2	3	4	5	6	7	8

Pengurus  
LVRI/Lurah

(.....)

**10. PENENTUAN KEMBALI TANGGAL JATUH TEMPO**

**PEMERINTAH KOTA CIREBON  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KOTA CIREBON**

JL. Pengampon No.04 Telp.(0231) 204066 – 205454 - CIREBON

TEGURAN

Nomor : ...../WPJ/KP ...../20 .....

Menurut Tata Usaha kami hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal STPD/SKPKB/SKPKBT/SK Pembedulan/SK Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak
			<b>Jumlah</b>	

(.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

Cirebon, ..... 20 .....

KEPALA DINAS PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KOTA CIREBON,

.....  
NIP.

**11. PEMBERITAHUAN AKAN MELAKSANAKAN SURAT PAKSA**

**PEMERINTAH KOTA CIREBON  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KOTA CIREBON**

Jl. Pengampon No.04 Telp.(0231) 204066 – 205454 - CIREBON

Cirebon, .....

Nomor :  
Sifat :  
Hal : Pemberitahuan akan Melaksanakan Surat Paksa

Dengan ini kami beritahukan bahwa akan melakukan tindakan penagihan berupa pelaksanaan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak/Penangguang Pajak (WP/PP) :

Nama Wajib Pajak/Penangguang Pajak : .....

NPWP : .....

Alamat/Tempat Tinggal : .....

Oleh karena yang bersangkutan sampai saat ini belum melunasi hutang pajaknya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

KEPALA DINAS PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KOTA CIREBON,

.....  
NIP.

**12. SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS**

**PEMERINTAH KOTA CIREBON**  
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH KOTA CIREBON**

JL. Pengampon No.04 Telp.(0231) 204066 – 205454 - CIREBON

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK  
SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor : ..... /WPJ/KP ..... /20 .....

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : .....  
 NPWP : .....  
 Alamat : .....  
 Untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp. ....

Menurut perincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal STPD/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak
			<b>Jumlah</b>	

(.....)  
 Pada hari ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....

Cirebon, .....

KEPALA DINAS PENDAPATAN  
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
 ASET DAERAH KOTA CIREBON,

.....  
 NIP.

**13. SURAT PAKSA**

**PEMERINTAH KOTA CIREBON**  
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH KOTA CIREBON**

Jl. Pengampon No.04 Telp.(0231) 204066 – 205454 - CIREBON

SURAT PAKSA

Nomor : ..... /WPJ/KP ..... /20 .....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
 ASET DAERAH KOTA CIREBON

Menimbang bahwa : .....  
 Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : .....  
 NPWP : .....  
 Alamat : .....

Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal STPD/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak
			<b>Jumlah</b>	

(.....)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Tempat Pembayaran. Ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam sesudah diberitahukan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam waktu 2 x 24 Jam Surat Paksa ini dipenuhi.

Ditetapkan di Cirebon  
 pada tanggal .....

KEPALA DINAS PENDAPATAN  
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
 ASET DAERAH KOTA CIREBON,

.....  
 NIP.

**14. LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA**

**PEMERINTAH KOTA CIREBON**  
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH KOTA CIREBON**

JL. Pengampon No.04 Telp.(0231) 204066 – 205454 - CIREBON

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

Nomor : ..... /WPJ/KP ..... /20 .....

I. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak: .....  
 NPWP : .....  
 Alamat : .....

II. Pelaksanaan :

1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal .....
2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa
3. Utang Pajak sebagaimana berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal STPD/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding *)	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar		Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	
			Menurut Surat Paksa	Menurut Tahun Pajak	Menurut Surat Paksa	Menurut Wajib Pajak

III. Data mengenai tunggakan pajak dan objek pajak sita wajib pajak/penanggung pajak :

A. Pengajuan/Penyelesaian Surat Keberatan

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal STPD/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal Surat Keberatan	Penyelesaian Surat Keberatan		
				Tanggal	Diterima/ Ditolak	Tunggakan Pajak

b. Objek Sita

1.	Jenis Barang Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga :
	.....	.....	Rp. ....
	.....	.....	Rp. ....
	.....	.....	Rp. ....

2.	Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga :
	.....	.....	Rp. ....
	.....	.....	Rp. ....
	.....	.....	Rp. ....

IV. Kesan dan Usul Juru Sita Pajak :

.....  
 .....  
 .....

Mengetahui,  
 KEPALA SEKSI PENAGIHAN DAN  
 PELAPORAN

Cirebon, .....  
 PETUGAS/JURU SITA,

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

**15. PROSEDUR KEBERATAN PBB**

Hal : Keberatan Atas SPPT/  
SKP PBB \*)Yang Diajukan  
Secara Perseorangan  
TahunPajak .....

Cirebon.....

Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA  
CIREBON

Di  
CIREBON

Yang bertanda tangan di bawahini :

Nama :  
Alamat :  
Kelurahan :  
Kota :  
NomorTelepon :

SebagaiWajibPajak/KuasaWajibPajak \*), atas ObjekPajak :

NOP :  
Alamat :  
Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kota :  
PBB Yang Terhutang : Rp.( )  
Tanggal SPPT/SKP PBB diterima :

Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKP PBB Tahun Pajak.....dengan alasan :

1. ....
2. ....

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut :

- |                                      |           |                           |             |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
| 1. Bumi                              | : .....   | m <sup>2</sup> x Rp. .... | =Rp. ....   |
| 2. Bangunan                          | : .....   | m <sup>2</sup> x Rp. .... | =Rp. .... + |
| 3. NJOP                              | : (1 + 2) |                           | = Rp. ....  |
| 4. NJOPTKP                           | :         |                           | = Rp. ....- |
| 5. NJOP Untuk Penghitungan PBB (3-4) |           |                           | = Rp. ....  |

Bersama ini dilampirkan :

1. SPPT Asli/SKP PBB yang diajukan keberatan
2. Foto copy identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
4. Bukti pendukung berupa Fotocopy :
  - a. Sertifikat, Akte Jual Beli, Akte Hibah
  - b. IMB
  - c. Lunas PBB
  - d. Dst ....

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

WAJIB PAJAK/KUASA PAJAK,  
.....

Keterangan : \*) Coret yang tidak perlu

## KOP SURAT KELURAHAN

Nomor : Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
 Lampiran : PENGELOLAAN KEUANGAN  
 Hal : Keberatan Atas SPPT DAN ASET DAERAH KOTA  
 Yang Diajukan Secara Kolektif CIREBON  
 Tahun Pajak .....

Di  
CIREBON

Yang bertanda tangan di bawah ini :

KepalaLurah :  
 Kecamatan :  
 Kota :  
 NomorTelepon :

Bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan Keberatan PBB yang terutang Tahun Pajak.....Sejumlah.....SPPT yang terletak di Kelurahan.....

Dengan alasan keberatan dan perhitungan PBB yang terutang menurut Wajib Pajak sebagaimana daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

1. SPPT Asli Tahun Pajak .....Sejumlah .....Lembar
2. Lampiran Daftar Keberatan PBB yang diajukan secara kolektif dan/atau
3. Bukti Pendukung berupa Fotocopy :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. Dst ...

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Cirebon, .....

LURAH

.....  
 NIP :

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 DAN HAK ASASI MANUSIA,  
 ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
 Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007